

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT , atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah – Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dan regulasi yang ada.

Adapun maksud dokumen LKJiP ini untuk memberikan laporan yang terkait dengan capaian kinerja dari Bappeda dan sebagai bahan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2023. Tujuan dokumen LKJiP memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan kepada para stakeholder yang membutuhkan dan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesainya LKJiP khususnya di BAPPELITBANGDA. Namun disisi lain kami menyadari dari apa yang telah selesai ini masih perlu adanya masukan dan saran guna sebagai koreksi untuk perbaikan laporan mendatang.

Pasuruan, 30 Desember 2023



**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN**

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kab Pasuruan.....	1
1.3 Sumber Daya BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	3
1.4 Potensi dan Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	7
1.5 Isu Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	9
1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023.....	11
1.7 Landasan Hukum.....	12
1.8 Sistematika penulisan.....	13
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	19
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Perubahan Renstra, dan Target Perubahan RPJMD Tahun 2028-2023.....	24
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur.....	27
3.1.4 Analisis Keberhasilan/ kegagalan terhadap peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	27
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rekomendasi.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2023.....	4
Tabel 1.2	Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2023.....	5
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan....	5
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasurua.....	7
Tabel 1.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023.....	7
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan dan Isu Straegis Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026.....	10
Tabel 1.7	Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	11
Tabel 2.1	Visi, Misi dan Sasaran Jangka Menengah yg berhubungan dengan TUPOKSI BAPPELITBANGDA.....	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	18
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2023 BAPPELITBANGDA.....	19
Tabel 3.2	Capaian Anggaran Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah	22
Tabel 3.3	Capaian Anggaran Indikator Persentase PD yang mempunyai dokumen yang baik.....	22
Tabel 3.4	Capaian Anggaran Indikator Persentase Dok Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan.....	23
Tabel 3.5	Capaian Anggaran Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.....	24
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023.....	25
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra.....	25
Tabel 3.8	Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja P-RPJMD Tahun 2019-2023.....	26
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur.....	27
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Program Tahun 2021-2023.....	28
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023.....	30
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	3
------------	--	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Indikator : Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA.....	20
Diagram 3.2	Capaian Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	22
Diagram 3.3	Capaian Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan.....	23
Diagram 3.4	Capaian Indikator : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan.....	24

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan BAPPELITBANGDA Daerah Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2023.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

LKjIP yang disusun pada tahun 2023 merupakan dari Capaian Kinerja Tahun Akhir Perubahan Renstra 2018-2023 yang merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rentang waktu 5 (lima) tahun banyak terjadi perubahan mulai dari kejadian luar biasa Covid-19 sampai perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan semua telah tertuang dalam dokumen perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyesuaian – penyesuaian terhadap capaian kinerja utama dan daerah, kenaikan capaian pada akhir tahun menyebabkan perubahan target kinerja yang dicapai.

I.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan.

BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Mempunyai. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

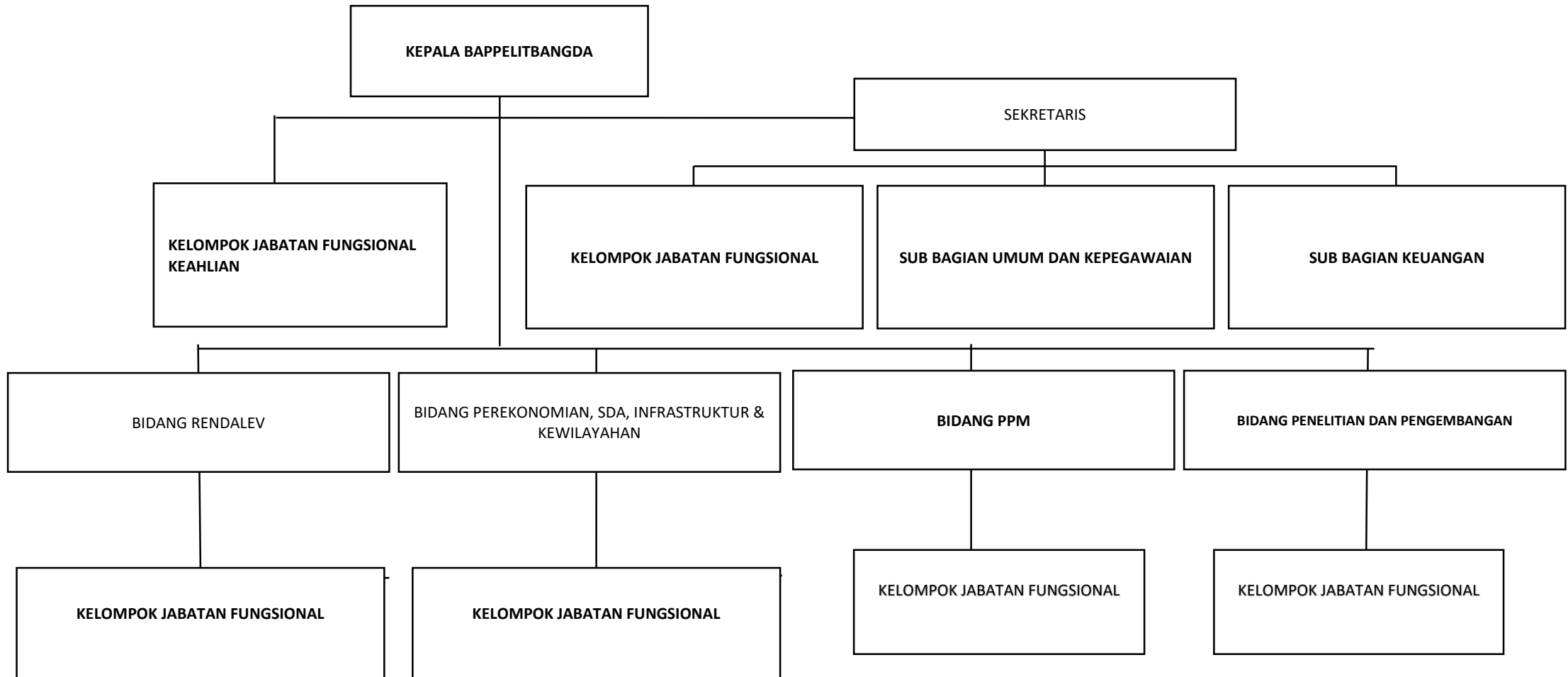
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan

- pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan *fungsinya*

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan. Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana gambar 1.1 berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPSELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

1.3 Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

1.3.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebanyak 54 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 3 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 16 orang. Jumlah seluruh pegawai BAPPELITBANGDA dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1.1 Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2023

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	1	Pembina	1	Eselon IIIb	1
S-2	8	Pembina Utama Muda	1	Eselon II v	1
		Pembina Tk I	1	Eselon IIIa	4
	-	Pembina	2	Eselon IIIb	2
		Pembina	2	JF Perencana	2
	-	Penata Tk. I	1	JF Peneliti	1
	-	Penata	1	JF Peneliti	1
S-1	2	Penata Tk. I	1	Kasubag keuangan	1
		Penata	1	Kasubag Umum	1
		Penata Tk. I	7	JF Perencana	7
		Penata Tk. I	1	JF Perencana	1
		Penata Muda	4	JFU	4
SMA		Penata Md Tk.I	8	JFU	8
		IX	3	JF Perencana	3
Jumlah	36		36		36

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2023

Tabel 1.2
Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan								
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	PTT	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	THL	6	-	-	-	-	10	-	-	16
Jumlah		6	-	-	-	-	12	-	-	18

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2023

1.3.2 Sarana Dan Prasarana

Kantor BAPPELITBANGDA terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang Tupoksi sebagaimana tabel -tabel berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas (mobil)	9 unit
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	10 unit
3	Komputer	48 unit
4	Laptop	36 unit
5	Netbook	5
6	Printer	61 unit
7	Plotter	1
8	Scanner	1 unit
9	UPS	26
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit
11	Meja Rapat	22 buah
12	Kursi Rapat	158 buah
13	Kursi Tamu	4 buah
14	Meja Tamu	1
15	Kursi Putar	2 buah
16	Meja Biro	5 buah
17	Meja Komputer	12 buah
18	Sofa	4

No	Uraian	Jumlah
19	Kursi Kerja	75
20	Meja Kerja	53 buah
21	Brankas	3 buah
22	Kamera	10 unit
23	LCD Proyektor	9
24	Layar Proyektor	2
25	Microphone	1
26	Telepon	30 unit
27	Mesin Faksimile	4
28	Televisi	1
29	Kaset Recorder	1
30	Sound sistem	1 paket
31	Wireless	1
32	Handycam	5
33	GPS	5 unit
34	Air Conditioner	36 unit
35	Mesin Fotokopi	1 unit
36	Lemari Besi	13 buah
37	Rak Kayu	16 buah
38	Filling Besi/Metal	16 buah
39	Lemari Kaca	2 buah
40	Lemari Kayu	14 buah
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah
42	Lemari Peta	1 buah
43	Papan Visuil	1 buah
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah
45	Papan Pengumuman	14 buah
46	Mesin Absensi	1 buah
47	Papan Panel	1

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2023

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Gudang	2	Ruang
6	Ruang Fungsional	1	Ruang
6	Loby	1	Ruang
7	Musholla	1	Ruang
8	Dapur	1	Ruang
9	Toilet / Kamar Mandi	4	Ruang

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, Tahun 2023

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Bappeda Kabupaten Pasuruan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis.

1.4 Potensi dan Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Pasuruan diukur melalui Indikator Kinerja Utama untuk mendukung sasaran strategis sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 1.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappeda
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Susai Ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilakukan dengan asistensi langsung dari Kemenpan & RB. Pelayanan Bappeda dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Potensi dan masalah diuraikan berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Pelayanan Perencanaan :

- 1) Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan

- Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik
2. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan

2) Potensi Tenaga

- Terdapat Fungsional Perencana Murni sebanyak 2 orang JFP Ahli Madya dan 1 orang JFP Ahli Muda
- Tersedia Klinik Perencanaan sebagai layanan bagi perangkat daerah melakukan konsultasi tentang perencanaan perangkat daerah.

3) Masalah :

- Pembentukan regulasi dari pemerintah pusat yang berpengaruh pada progres dan substansi dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah (antara lain Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan penerapan aplikasi SIPD bagi semua pemerintah daerah).

- Penyederhanaan Birokrasi yang terlaksana pada akhir bulan Bulan Desember 2021, dimana pejabat eselon IV beralih menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda.

Pelayanan Kelitbangan :

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah

Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

1) Potensi :

- Masih tersedia anggaran untuk kegiatan Litbang untuk mendukung pengukuran IKU daerah yaitu indeks Williamson yang dan indeks kesalehan sosial.
- Terdapat Tim Percepatan Realisasi Fokus Pembangunan (PERFORP) Daerah yang mendukung Kegiatan Kelitbangan antara lain menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah, IPTEK tahun 2019-2023 (Perbup Nomor 3 Tahun 2020)

2) Masalah :

- Penelitian yang mendukung IKD masih kurang dari 50%

- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

(1) Potensi :

- Penilaian SAKIP Perangkat Daerah untuk capaian Target sesuai akhir renstra yaitu nilai 85
- Diharapkan agar kualitas dokumen SAKIP bertambah menjadi baik

1.5 Isu Strategis BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis.

Tabel 1.6
 Identifikasi Permasalahan dan Isu Straegis Renstra BAPPELITBANGDA
 Tahun 2024-2026

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan Koordinasi belum bisa optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik	Belum menerapkan perencanaan dengan menggunakan metode THIS	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah • Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah • Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial
2.	Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah	Data dan Informasi yang belum tervalidasi	Belum optimalnya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
3.	Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan keputusan.	Hasil – hasil penelitian yang dikaitkan dengan pembangunan di Kabupaten pasuruan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan	Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah

1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan berikut Matrik Tindak lanjut dari LHE SAKIP 2023, dengan beberapa perbaikan yang sedang dan dilaksanakan oleh Bappelitbangda

Tabel 1.7
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Menyusun Pedoman/ Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan di Lingkungan Kabupaten Pasuruan	Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Perencanaan Kinerja serta pengukuran Kinerja dan pengumpulan Data Kinerja Bagi Perangkat Daerah	November 2023	Sekretaris	selesai (100%)
	Menyelaraskan rumusan indikator pada tiap-tiap dokumen perencanaan antara lain pada Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dengan LKJIP	1. Membuat Matrik Keselarasan antara Renstra, Renja, PK dengan LKJIP	Matrik Keselarasan Renstra, Renja, PK dengan LKJIP	Oktober 2023	Sekretaris	selesai
		2. Perbaiki Indikator Sasaran pada Perubahan Renja 2023	Dokumen P Renja 2023	September 2023	Sekretaris	selesai
		3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	PK Perubahan Tahun 2023	November 2023	Sekretaris	selesai

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
		4.perbaiki indicator dituangkan dalam Penyusunan LKJIP Tribulan IV Tahun 2023	LKJIP Tahun 2023	Januari 2023	Sekretaris	selesai

1.7 Landasan Hukum

Peraturan peundangan yang mnejadi dasar dalam penyusunan Laporan kinerja adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Noor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2023.

1.8 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekananan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja Propinsi Jawa Timur
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat pada lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini.

2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dokumen Perubahan Renstra adalah merupakan instrument atau sebagai acuan untuk mewujudkan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD, sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Daerah yang berhubungan dengan TUPOKSI Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Visi Misi RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2023	2023
Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, Dan Berdaya Saing							
Misi :							
1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat							
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial							
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan							
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00

Visi Misi RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2023	2023
yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	NILAI SAKIP	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)
		OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	70	71	70,02	70,03	74
		Indeks SPBE	n/a	n/a	n/a	80	82
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang prima	IKM	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan							

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan janji kinerja yang menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun dan perubahan di Bulan November, terdapat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	3.1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	skor	85
2.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1,1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	100
		1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	100
3	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100

Secara lengkap dokumen perjanjian kinerja eselon II sebagaimana terlampir :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tersebut memberi gambaran tercapai/tidaknya target beserta penjelasan yang cukup memadai, sebagai bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya. Uraian capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasuruan di tahun 2023 dapat digambarkan melalui Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

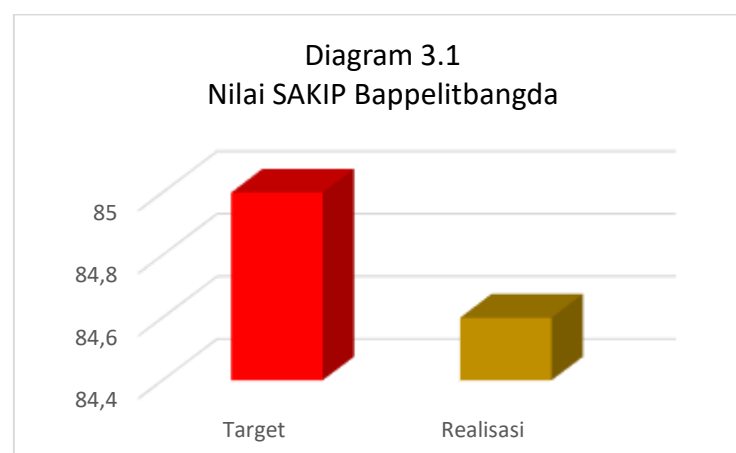
No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	skor	85	84,60	99,53
2	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	100	96,36	96,36
		1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100
3	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 3.1 Bappeda pada tahun 2023 menjelaskan secara keseluruhan telah sepenuhnya mencapai target yang ditentukan dengan uraian sebagai berikut :

A. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indicator sasaran Renstra 2018-2023 untuk menilai akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Propinsi Jawa Timur. Hasil penilaian oleh Tim Evaluasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mendapatkan nilai 84,60 berdasarkan LHE Implementasi SAKIP Tahun 2023. Nilai tersebut tidak mencapai target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 85, sehingga capaian indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar 99,53%. Nilai tahun 2023 menurun daripada tahun 2022 sebesar 84,79. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya meliputi :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
2. Peta Proses Bisnis
3. Rencana Strategis
4. Rencana Kerja
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6. Perjanjian Kinerja
7. Laporan Kinerja
8. Dokumen Evaluasi Internal
9. Rencana Aksi



Tabel 3.2

Capaian Anggaran Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.458.859.968	7.481.368.627	88,44%

B. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik sebesar 98,1% dengan capaian anggaran 98,1%. Dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{\% yang memp dok ren yang baik} &= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{53}{55} 100\% = 96,36\% \end{aligned}$$

Perangkat daerah dikatakan mempunyai dokumen yang baik dengan memenuhi kriteria yaitu :

- a. sesuai permendagri 86/2017(sistematika)
- b. keselarasan dok perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja)
- c. keselarasan dok perencanaan RENSTRA -(Ranwal Renja, Rancangan,Renja, Rancangan Akhir RENJA)(Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja)
- d. keselarasan dok perencanaan RKPD (Ranwal RKPD, Rancangan RKPD< Rancangan Akhir RKPD) - RENJA (Ranwal Renja, Rancangan,Renja, Rancangan Akhir RENJA) (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)
- e. keselarasan Rancangan RENJA OPD - Berita Acara MUSRENBANG RKPD (Program, Kegiatan dan Lokasi)
- f. keselarasan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja) dengan Dokumen Perencanaan Sektoral (RTRW, Kajian Bidang)
- g. Catatan Khusus : Untuk Perangkat Daerah kategori Baik (80% - 100%), dibawah 80% dikategorikan Tidak Baik

Capaian target Perangkat Daerah yang memiliki dokumen yang baik sejumlah 53 Perangkat Daerah dan 2 Perangkat Daerah dokumen perencanaan yang disusun masih kurang baik, sehingga Target sebesar 100% tidak dapat tercapai hanya sebesar 98,1 %, dapat disajikan dalam gambar diagram berikut.



Tabel 3.3

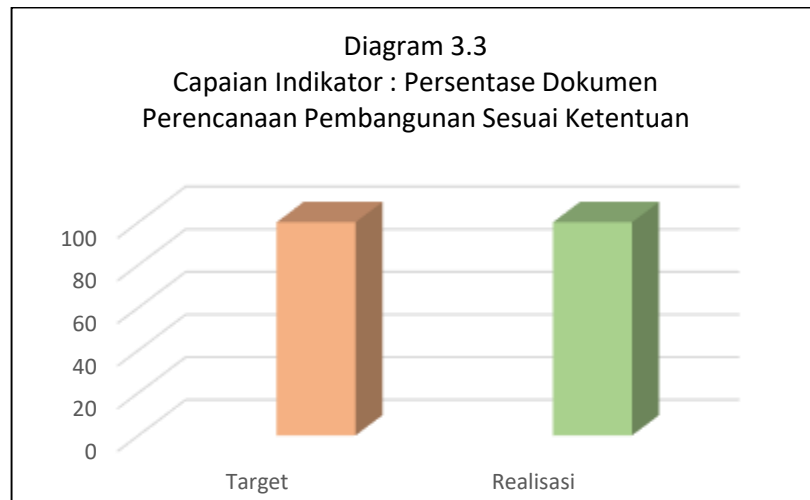
Capaian Anggaran Indikator Persentase PD yang mempunyai dokumen yang baik

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.607.967.550	1.532.071.106	95,28%

C. Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan.

Indikator Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan sesuai Ketentuan dengan target sebesar 100% dengan capaian 100% dengan capaian anggaran 99%, terdiri dari Penyusunan Dokumen RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut.

- a. Ketepatan Waktu Penyusunan RPJMD/RKPD/RKPDP (Sesuai batas akhir penyelesaian dokumen) 40%
- b. RPJMD/RKPD/RKPDP mengacu dokumen perencanaan di atasnya (RKP dan RKPD Prov,), (RPJMD Prov dan RPJMN), 30%
- c. Kesesuaian dokumen yang disusun dengan Dokumen perencanaan di atasnya, Dok Strategis Lain, Dokumen Sektor, Peraturan perundang-undang yang berlaku) dengan ketentuan yang berlaku 30%



Tabel 3.4
Capaian Anggaran Indikator Persentase Dok Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.024.496.900	1.875.344.442	92,63%

D. Indikator kinerja Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan

Sedangkan Indikator kinerja Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti, pada indikator ini berhasil 100%, yaitu dari target yang ditentukan sebesar 100 % realisasi 100%, realisasi anggaran 98,8% hasil Litbang ditindaklanjuti dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Hasil Litbang yg di tindaklanjuti} &= \frac{\text{Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Litbang Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil Penelitian dan pengembangan Bappelitbangda Tahun 2023 :

1. Kajian Penanganan Limbah Peternakan Sapi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
2. Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
3. Kajian Refleksi dan Ekstrapolasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
4. Kajian Efektifitas Penurunan Presentase Stunting Melalui Gerakan Kasih Bersanding Mesra di Kabupaten Pasuruan
5. Kajian Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
6. Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Pasuruan
7. Kajian Perbanyak Benih Kentang Dengan Sistem Stek
8. Kajian Pembentukan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan



Tabel 3.5

Capaian Anggaran Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.392.850.000	2.313.590.686	96,69%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Perubahan Renstra, dan Target Perubahan RPJMD Tahun 2028-2023

Tercapainya target pada indikator kinerja ini tidak lepas dari tingkat pemahaman OPD untuk melakukan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan regulasi yang ada, dapat disajikan dalam table 3.6 dan 3.7 berikut

Tabel 3.6

Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	poin	78	80	80	81,48	83	83,42	84	84,79	85	84,60
2	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	88	89	88	89	91	94,64	94,5	100	100	96,36
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	20	80	80	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	84,60	-0,4%
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	100	96,36	-3,64%
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	100	100	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100	100	0

Pada Tabel 3.7 diatas pada dasarnya dalam pembahasan sama dengan Tabel 3.1. yaitu target akhir di Renstra dan tingkat kemajuan untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik yaitu – 3,64 %, Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, sedangkan Meningkatnya nilai SAKIP sebesar -0,4%.

Tabel 3.8

Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja P-RPJMD Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	poin	78	80	80	81,48	83	83,42	84	84,78	85	84,60
	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	88	89	88	89	91	94,64	94,5	100	100	96,36
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	20	80	80	100	100	100	100	100	100	100

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam Indikator Kinerja Bappeda Propinsi Jawa Timur adalah diuraikan dalam Tabel 3.9

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Ket.
		Th. 2023	Propinsi	(+/-)
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,60	81,53	-
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	96,36	0	-
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	100	0	-
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan	100	0	-

Perbandingan dengan Capaian Kinerja dari Bappeda Propinsi Jawa Timur dengan sasaran dan indicator kinerja yang sama dengan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan yaitu pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3.1.4 Analisis Keberhasilan/ kegagalan terhadap peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan berdasarkan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan, Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah dan Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Capaian Program sebagai berikut. Capaian Indikator Program pada Tahun 2021-2023 disajikan berikut ini

Tabel 3.10
Target dan Realisasi
Program Tahun 2021-2023

No	Program	Indikator	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100%	100%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang PPM yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	92,68%	92,68%	95%	95%	100%	97,5%
		Persentase Perangkat Daerah Bidang PERSIK yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	91%	91%	93%	93%	100%	93%
3.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indikator Program pada Tahun 2021 sampai 2023 pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota yaitu sama 100%. UNTUK Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian Bidang PPM 97,5% dan Bidang PERSIK 93%

Keberhasilan dari capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten pasuruan Tergantung pada 4 indikator program diatas dengan proporsional dalam pembagian kinerja dan anggaran. Faktor-

faktor yang mendukung keberhasilan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Telah memiliki Fungsional Perencana Ahli Madya dengan inovasi Klinik Perencanaan, tempat konsultasi para perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Bappelitbangda yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagai perencana, untuk menaikkan IP ASN yang masih rendah.
- c. Pendampingan kepada Perangkat Daerah, UOBK, Sekolah-sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah

Selain Faktor Penentu Keberhasilan, terdapat juga faktor Penghambat yaitu :

- a. Sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan antara masyarakat, stakeholder belum maksimal
- b. Masih kurangnya inovasi dari Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam rangka pemenuhan nilai Inovasi Daerah

Beberapa solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Keterbukaan Informasi dalam rangka perencanaan, telah menggandeng stakeholder/masyarakat dalam rangka pendukung capaian IKU Bupati Pasuruan dengan beberapa mitra seperti USAID dan lain-lain.
- b. Telah dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat agar ikut serta dalam Peningkatan Inovasi Daerah.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dalam penggunaan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan melaksanakan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana kami sajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/ Kota	100%	99,53%	8.458.859.968	7.481.368.627	88,44%	11,56%
1	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Pogram Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	98,1%	1.607.967.550	1.532.074.106	95,28%	4,72%
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	2.024.496.900	1.875.344.442	92,63%	7,37%
2	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	100%	2.392.850.000	2.313.590.686	96,69%	3,31%
JUMLAH						14.484.174.418	13.202.377.861	91,15	8,85%

Efisiensi Anggaran :

1. Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan efisiensi sebesar 11,56% dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai setor kembali tinggi, namun sub kegiatan yang lainnya dalam pelaksanaannya telah melampaui target, dengan anggaran sesuai kebutuhan.
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik dengan efisiensi anggaran 4,72% efisiensi tersebut karena kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase PD yang mempunyai Dokren baik sudah terlaksana dengan baik meskipun secara kinerja tidak melampaui target.
3. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan dengan efisiensi 7,37% efisiensi tersebut beberapa kegiatan terlaksana dengan baik dalam rangka mendukung Penyusunan Dokumen Perencanaan RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026, RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, serta kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045.
4. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan dengan efisiensi 3.31% karena seluruh kegiatan penyusunan dokumen kajian penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sesuai target penyusunan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tabel 3.12 Dijelaskan tentang alokasi Sasaran Pembangunan yang terdapat pada sasaran strategis dan Indikator kinerja. Tahun 2023 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.484.174.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.202.377.861,- atau sebesar 91,15% dengan rincian tersebar pada semua sarana strategis.

Tabel 3.12

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100	8.458.859.968	7.481.368.627	88,44
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah	dok	8	8	100	343.742.300	328.849.178	95,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang disusun	dok	6	6	100	143.406.800	137.746.250	96,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap capaian kinerja & ikhtisar realiasi kinerja SKPD	laporan	2	2	100	158.227.300	152.366.000	96,30
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah	dokumen	2	2	100	42.108.200	38.736.928	91,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	6.333.507.768	5.555.966.291	87,72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	532	532	100	5.853.039.272	5.080.421.771	86,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang/bulan	144	144	100	374.918.496	371.534.520	99,10
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang/bulan	96	96	100	105.550.000	104.010.000	98,54
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	42.000.000	41.914.800	99,80

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit	7	7	100	42.000.000	41.914.800	99,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	%	100	125	125	167.100.000	157.100.000	94,02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	67	335	167.100.000	157.100.000	94,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	100	100	100	851.247.000	769.821.958	90,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	20	20	100	42.280.000	23.073.900	54,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis-kali	46	46	100	91.955.000	58.385.200	94,24
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jenis-kali	25	25	100	107.352.000	52.908.500	49,29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	eksemplar	168	168	100	12.350.000	11.205.000	90,73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	45	100	552.310.000	549.379.858	99,74
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	m/linier	50	90	180	75.000.000	74.869.500	99,83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	%	100	100	100	186.255.500	158.053.000	84,86

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	23	23	100	186.255.500	158.053.000	84,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	120.212.500	114.399.332	95,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	rekening	96	96	100	115.412.500	109.599.332	94,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	48	48	100	4.800.000	4.800.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD di Perangkat Daerah	%	100	100	100	414.794.900	355.264.068	85,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	35	35	100	328.453.400	299.362.468	91,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	26	100	27.230.000	11.381.600	41,80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	83	83	100	59.111.500	44.520.000	75,32
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	2.024.496.900	1.875.344.442	92,63

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PERENCANAAN								
PEMBANGUNAN DAERAH	Daerah yang sesuai ketentuan							
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen, BA, Laporan hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	59 Berita Acara dan 3 dokumen	28	28	100	1.791.899.700	1.659.121.692	92,59
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	100	261.947.400	255.488.000	97,53
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100	250.444.300	214.946.000	85,83
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	dokumen	24	24	100	57.985.000	52.400.000	90,37
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	3	3	100	1.221.523.000	1.136.287.692	93,02
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	dokumen	100	100	100	47.783.000	36.792.750	77,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	1	1	100	47.783.000	36.792.750	77,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Laporan	100	1	1	184.814.200	179.430.000	97,09

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	100	162.714.000	158.477.000	97,40
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	5	5	100	22.100.200	20.953.000	94,81
POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang PPM yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%	95	95	100	1.607.967.550	1.532.074.106	
	Persentase Perangkat Daerah Bidang PERSIK yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%	93	93	100	1.607.967.550	1.532.071.106	
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Sosial Budaya	Dokumen	92	92	100	736.651.000	695.759.726	94,45
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	53.060.200	49.674.761	93,62
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100	50.922.400	40.100.796	78,75

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	12	100	90.748.000	88.595.347	97,63
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24	24	100	149.358.500	139.694.959	93,53
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen				86.734.400	84.603.021	97,54
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen				305.827.500	293.090.842	95,84
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen dan laporan koordinasi, Asistensi dan Monev PD Bidang Perekonomian dan SDA	9 dok, 16 laporan	30	30	100	509.568.750	489.025.374	95,97
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	100	18.434.400	16.139.500	87,55

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	4	100	23.974.700	22.058.900	92,01
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	dokumen	1	1	100	35.755.600	31.620.000	93,68
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	100	135.980.500	131.399.373	96,63
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	100	252.934.450	248.003.901	98,05
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen dan laporan koordinasi, Asistensi dan Monev PD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	9 dokumen, 14 laporan	19	19	100	361.747.800	347.289.006	96,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	5	100	183.194.800	172.614.663	94,22
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	dokumen	5	5	100	15.568.200	14.108.200	94,22

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PERENCANAAN	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	2	2	100	32.430.300	30.712.800	94,70
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	100	106.842.000	106.593.493	99,77
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Kewilayahan	dokumen	2	2	100	7.697.000	7.291.200	94,73
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	dokumen	1	1	100	16.015.500	15.968.650	99,71
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	2.392.850.000	2.313.590.686	96,69
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	dokumen	4	4	100	559.650.000	552.541.358	98,73

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	dokumen	2	2	100	559.650.000	552.541.358	98,73
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	dokumen	4	4	100	637.500.000	613.849.943	96,29
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	dokumen	4	4	100	637.500.000	613.849.943	96,29
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen	6	6	100	475.000.000	458.104.676	96,44
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	6	6	100	475.000.000	458.104.676	96,44
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	dokumen	4	4	100	720.700.000	689.094.709	95,61
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen				290.000.000	276.818.000	95,45
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	dokumen	4	4	100	430.700.000	412.276.709	95,72
JUMLAH						14.484.174.418	13.202.377.861	91,15

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan :

Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) telah ditetapkan 4 (empat) indikator untuk mengukur pencapaian sasaran strategis

- Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik ;
- Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan
- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target yang ditetapkan pada Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik adalah sebesar 98,1% dan capaian hasil atas indikator tersebut terealisasi sebesar 98,1%, Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan sebesar 100%, indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti, ditetapkan target sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 100% dan Nilai SAKIP PD target 85 dan terealisasi 84,60.

4.2 Rekomendasi :

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan. Metode yang digunakan untuk mendukung komitmen ini adalah melalui pengikutsertaan personil Bappelitbangda dalam pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis perencanaan pembangunans selain itu juga Bappelitbangda dalam membina para Perencana dan Kasubag Penyusunan dan Program di seluruh OPD diikuti sertakan dalam Bimtek Perencanaan.

Keselarasn Dokumen Perencanaan dari Perangkat Daerah juga harus dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Kepala Bappelitbangda, sehingga memberikan output Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang baik.

Dari uraian kondisi yang diharapkan dan kondisi senyatanya diatas, serta dielaborasi dengan upaya solutif yang sudah dilaksanakan dan ditawarkan

tersebut, maka semuanya bermuara pada perlunya komitmen yang kuat serta konsistensi, baik secara internal Bappelitbangda maupun eksternal melalui Organisasi Perangkat Daerah penopangnya serta para stakeholder. Dengan komitmen dan konsisten dalam penyusunan perencanaan yang kuat, maka akan terwujud perencanaan yang transparan, akuntabel serta berkelanjutan.

Pasuruan, 30 Desember 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM**

Jabatan : **KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. PASURUAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes**

Jabatan : **Pj. BUPATI PASURUAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes


BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan : Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	-	25,42
		Nilai SAKIP Pengukuran		22
1.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	-	85
2.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik.	Persen	100
		Persentase Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Persen	100
3.	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan	Persen	100

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.458.859.968	P- APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.024.496.900	P- APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.607.967.550	P- APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.392.850.000	P- APBD
	TOTAL	14.484.174.418	P- APBD

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes


BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 119741031 199311 1 001